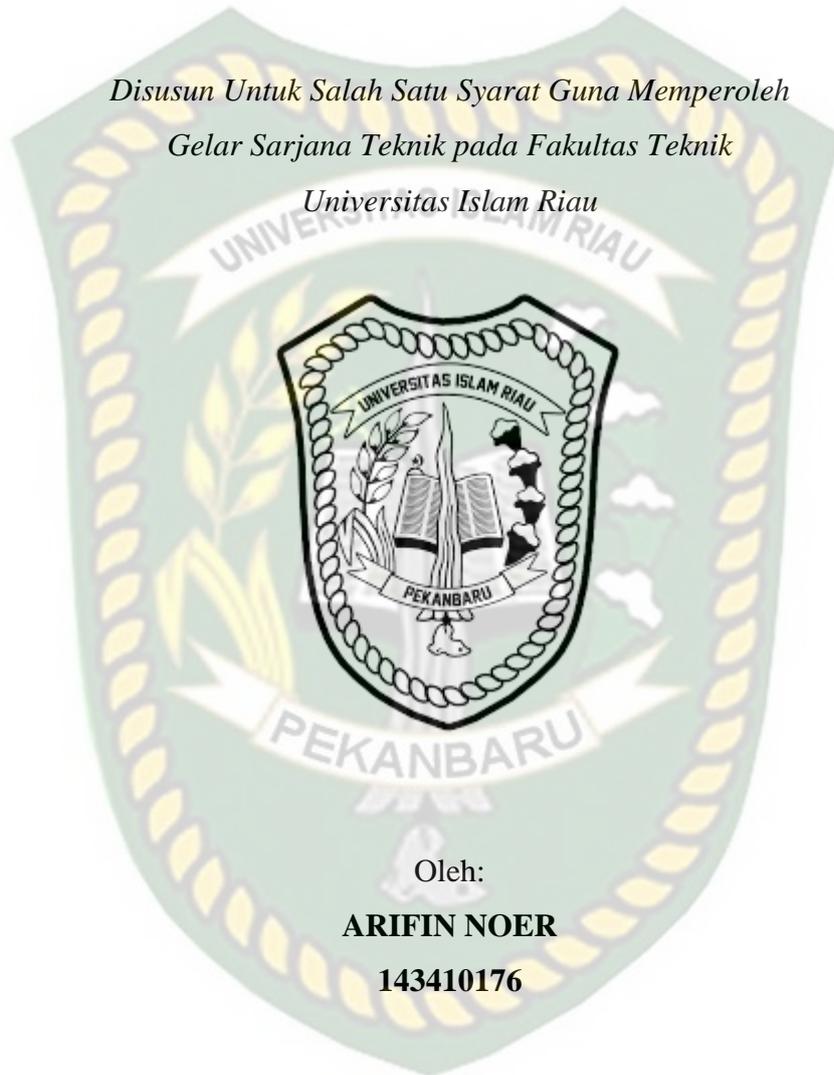


**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA BANTAN AIR KECAMATAN BANTAN**

**TUGAS AKHIR**

*Disusun Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Teknik  
Universitas Islam Riau*



Oleh:

**ARIFIN NOER**

**143410176**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'ala* penulis ucapkan atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal Tugas Akhir yang berjudul ***“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan”*** ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang berperan penting dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau .
2. Bapak Dr. Eng. Muslim, ST, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ir. H. Firdaus Agus, MP selaku Pembimbing yang telah mendorong, membimbing serta memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Kepada Staf Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
6. Ayahanda H. Ilham Noer dan Ibunda HJ Erni Andriani yang sangat penulis cintai, sayangi dan hormati yang tidak henti-hentinya memberikan

dukungan moril maupun materil serta doa, nasihat dan motivasi hingga sampai pada detik ini penulis tetap kuat dan akan terus melangkah hingga menyelesaikan studi.

7. Keluarga besar organisasi Internal badan eksekutif mahasiswa, himpunan planologi dan seluruh himpunan mahasiswa jurusan selingkungan Fakultas Teknik
  8. Keluarga besar organisasi eksternal himpunan mahasiswa islam cabang Kota Pekanbaru, himpunan mahasiswa islam komisariat Fai-Teknik serta Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis.
  9. Teman seperjuangan keluarga besar Planologi 14-A yang telah memberikan motivasi dan membantu meberikan saran kepada penulis.
- Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepan dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Pekanbaru, 4 November 2021

**ARIFIN NOER**  
**143410176**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	III
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	VI
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	VII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	6
1.4.Manfaat Penelitian .....	7
1.5.Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.1. Ruang Lingkup Materi .....	8
1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah .....	9
1.6.Kerangka Berpikir.....	11
1.7.Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1. Partisipasi Masyarakat .....	13
2.1.1. Konsep Partisipasi Masyarakat .....	13
2.1.2. Manfaat Partisipasi Masyarakat .....	17
2.1.3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat .....	19
2.1.4. Bentuk dan Indikator Partisipasi Masyarakat .....	23
2.1.5. Konsep Tingkat Partisipasi .....	24
2.1.6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Al-Quran.....	26
2.2. Faktor – Faktor Partisipasi Masyarakat.....	27

2.3. Perencanaan Pembangunan .....	29
2.3.1. Pengertian Perencanaan .....	29
2.3.2. Pengertian Pembangunan .....	30
2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	32
2.4. Desa .....	34
2.4.1. Pengertian Desa .....	34
2.4.2. Prinsip Perencanaan Desa .....	35
2.4.3. Pembangunan Desa .....	37
2.5. Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Pendekatan Metode Penelitian .....	42
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
3.3. Populasi dan Sampel .....	45
3.1.1. Populasi .....	45
3.1.2. Sampel .....	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.4.1. Jenis dan Sumber Data .....	48
3.5. Variabel Penelitian .....	50
3.5.1. Analisis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	51
3.5.2. Analisis Faktor – Faktor Partisipasi Masyarakat .....	51
3.5.3. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	52
3.6. Analisa Data .....	52
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	56
4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis .....	56

4.1.2. Sejarah Kabupaten Bengkalis .....	58
4.2. Keadaan Umum Kecamatan Bantan .....	60
4.2.1. Keadaan Geografis Kecamatan Bantan.....	60
4.3. Keadaan Umum Desa Bantan Air .....	62
4.3.1. Keadaan Geografis Desa Bantan Air .....	62
4.3.2. Pendidikan dan Kehidupan Beragama .....	63
4.3.3. Karakteristik Masyarakat Desa Bantan Air .....	66
<b>BAB V HASIL dan PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
5.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Proses Perencanaan Pembangunan Desa .....	70
5.1.1. Identifikasi Proses Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa.....	70
5.1.2. Rencana Kegiatan Pembangunan.....	83
5.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	92
5.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi .....	94
5.2.1. Faktor Internal .....	94
5.2.2. Faktor Eksternal .....	97
5.3. Terukurnya Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	98
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>102</b>
6.1. Kesimpulan .....	102
6.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	106
DOKUMENTASI .....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1. Uraian Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	43
Tabel 3.2. Daftar Responden Kuesioner .....	47
Tabel 3.3. Kebutuhan Data.....	49
Tabel 3.4. Variabel Penelitian.....	50
Tabel 3.5. Analisis Pendekatan Penelitian .....	54
Tabel 3.6. Desain Penelitian.....	55
Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis .....	58
Tabel 4.2. Daftar Pembagian Wilayah Kecamatan Bantan.....	61
Tabel 4.3. Sarana Pendidikan.....	63
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	64
Tabel 4.5. Sarana Ibadah Di Desa Bantan Air .....	65
Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku .....	66
Tabel 4.7. Mata Pencarian Masyarakat .....	67
Tabel 4.8. Luas Kebun dan Hasil Produksi.....	68
Tabel 5.1. Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2018 .....	86
Tabel 5.2. Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019 .....	89
Tabel 5.3. Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 .....	91
Tabel 5.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat Vertikal.....	92
Tabel 5.5. Bentuk Partisipasi Masyarakat Horizontal.....	93
Tabel 5.6. Persentase Faktor Kesadaran dan Kemauan Masyarakat.....	95
Tabel 5.7. Persentase Faktor Pendidikan .....	96
Tabel 5.8. Persentase Faktor Pendapatan .....	97
Tabel 5.9. Persentase Pemerintah dan Fasilitas Desa .....	97
Tabel 5.10. Persentase Tingkat Partisipasi .....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian .....	11
Gambar 3.1. Peta Administrasi Lokasi Penelitian .....	44
Gambar 4.1. Luas Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis.....	56



# TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BANTAN AIR KECAMATAN BANTAN

ARIFIN NOER

NPM : 143410176

## Abstrak

Partisipasi masyarakat Desa Bantan Air memiliki peran yang sangat penting demi terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan target dan rencana pembangunan yang ditetapkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Indikasi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dilihat berdasarkan notulen musrenbang desa tahun 2020 dengan tingkat kehadirannya 24 persen dalam forum musrenbang tingkat desa. Indikasi lain usulan-usulan rencana pembangunan yang disampaikan kepada forum musrenbang realisasinya tidak sesuai dengan yang diusulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bantan Air dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif, menganalisis hasil pengukuran dengan Skala Likert setelah dilakukan pemberian skor dan pembobotan, baik untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan maupun mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan didapatkan partisipasi masyarakat berbentuk partisipasi Vertikal dimana sekitar 26,05 persen masyarakat dinyatakan terlibat menjadi penentu keputusan dalam musrenbang dan masyarakat menyetujui keputusan musrenbang. Sementara berdasarkan hasil analisis bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 39,432 persen, berada di angka 21-40 persen (R) atau Partisipasi masyarakat tergolong kategori rendah. Rendahnya tingkat partisipasi ini diketahui dari faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor kesadaran dan kemauan, pendidikan serta pendapatan yang termasuk didalam faktor Internal, dimana masyarakat hanya mengikuti anjuran pemerintah sebanyak 67 persen, faktor pendidikan masyarakat hanya sebatas tamatan Sekolah Menengah Atas 48.7 persen dan faktor pendapatan rata-rata masyarakat memiliki pendapatan Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 dengan angka 48 persen.

**Kata Kunci :** Partisipasi, Masyarakat, Perencanaan pembangunan

**THE LEVEL OF COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT  
PLANNING IN THE VILLAGE OF BANTAN AIR SUB DISTRICT OF  
BANTAN**

**ARIFIN NOER**

**NPM : 143410176**

**Abstract**

The participation of the people of Bantan Air Village has a very important role for the realization of village development in accordance with the targets and development plans set out in the Development Plan Deliberation (Musrenbang) in Bantan Air Village, Bantan District. An indication of the low level of community participation in the development planning process is seen from the minutes of the 2020 village musrenbang with a 24 percent attendance rate in the village-level musrenbang forum. Another indication is that the development plan proposals submitted to the musrenbang forum are not realized in accordance with those proposed. This study aims to measure the level of community participation in the infrastructure development planning process in Bantan Air Village using the quantitative descriptive research method, analyzing the measurement results with a Likert Scale after scoring and weighting, both to determine the form of community participation in the development planning process and to determine the factors -factors that affect the level of community participation. The results of the research conducted in Bantan Air Village, Bantan District, obtained community participation in the form of Vertical participation where around 26.05 percent of the community were stated to be involved in making decisions in the musrenbang and the community agreed to the musrenbang decision. Meanwhile, based on the results of the analysis that the level of community participation in the development planning process is 39.432 percent, it is at 21-40 percent (R) or community participation is in the low category. The low level of participation is known from the influencing factors, awareness and willingness factors, education and income which are included in internal factors, where people only follow government recommendations as much as 67 percent, community education factors are only limited to high school graduates 48.7 percent and income factors the average community has an income of Rp. 500,000 – Rp. 1,000,000 with a figure of 48 percent.

**Keywords :** *Participation, Community, Development Planning*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hariyono, 2010). Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Pada era reformasi, paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Paradigma perencanaan strategis dipilih oleh pemerintah karena dianggap memiliki manfaat yang jelas dalam jangka waktu yang singkat (Hariyono, 2010).

Paradigma perencanaan strategis yang dianut oleh pemerintah dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai lebih dengan melibatkan *stakeholders* (para pemangku kepentingan) yang menjadikan perencanaan pembangunan daerah menjadi tepat sasaran. Dengan adanya kelebihan tersebut, maka *stakeholders* dapat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di wilayahnya masing-masing, sehingga perencanaan pembangunan daerah berlangsung secara partisipatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang demokratis melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, serta partisipatif dan berinisiatif. Masyarakat semakin dituntut oleh arus globalisasi yang begitu cepat untuk mengubah pemikiran dan perilaku saat ini dengan inovasi teknologi informasi. Meskipun daerah diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan pembangunan daerahnya sendiri, namun konsep pembangunan daerah harus tetap berada pada lingkup pembangunan nasional yang merupakan akumulasi dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan harus mencakup seluruh wilayah dan menyentuh semua strata masyarakat serta segala aspek kehidupan baik itu dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara.

Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Maka untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui dan memahami permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya dan masyarakat pula yang akan memanfaatkan dan menilai tentang keberhasilan pembangunan di wilayah mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk dari pemetaan lingkungan perencanaan karena masyarakat yang paling memahami kondisi lingkungannya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari keberadaan forum-forum perencanaan pembangunan daerah yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap daerah. Musrenbang diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam menentukan rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya.

Keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukan hal yang baru. Saat ini, partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu pergerakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat atau pemerintah. Namun kedua pihak bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga menghasilkan perencanaan yang baik bagi semua pihak (Tapparang, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat secara individu, kelompok, maupun organisasi dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses perumusan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Studi kasus dalam penelitian ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bantan, yaitu Desa Bantan Air. Pelaksanaan pembangunan di Desa Bantan Air tidak luput dari keterlibatan masyarakatnya. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat Desa Bantan Air memiliki peran yang sangat penting demi terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bantan khususnya di Desa Bantan Air. Wujud dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Desa Bantan Air yang penulis amati dalam proses pra-penelitian adalah adanya pembangunan berbagai infrastruktur seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, prasarana drainase dan jalan. Selain pembangunan infrastruktur tersebut, Desa Bantan Air juga memiliki kegiatan sosial guna menjaga hasil dari perencanaan pembangunan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa dan Masyarakat Desa Bantan Air yang telah peneliti lakukan pada tahap pra-penelitian, peneliti mengetahui keterlibatan masyarakat di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan dalam perencanaan pembangunan desa dimulai dari tingkat dusun. Setiap Kepala Dusun mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah terkait dengan permasalahan di

dusunnya dan kegiatan perencanaan pembangunan apa saja yang perlu dilakukan. Setelah semua usulan masyarakat pada tingkat dusun terkumpul, para pejabat dusun menyampaikan usulan-usulan tersebut pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa. Usulan-usulan tersebut akan dimusyawarahkan bersama pejabat desa kemudian dirumuskan program-program yang bisa dijadikan rencana. Program-program yang terpilih harus dilihat berdasarkan prioritas kepentingan publik dan ketersediaan dana desa.

Namun pada hasil pengamatan pra-penelitian yang telah dilakukan bahwa *pertama* terjadi perbedaan antara usulan kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat dalam Musrenbang dengan kegiatan yang direalisasikan. *Kedua*, masalah keterlibatan masyarakat diindikasikan masih relative rendah dengan angka 24 persen kehadiran peserta Musrenbang Desa Bantan Air tahun 2020. Pengamatan ini juga berdasarkan dari hasil wawancara dengan seorang mahasiswa yang menceritakan bahwa masyarakat di desa tempat tinggalnya yaitu Desa Bantan Air kurang menanggapi secara serius tentang musrenbang desa. Ini juga bisa diketahui berdasarkan data notulen rapat dalam kegiatan dokumen musrenbang desa Bantan Air pada tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan berubah menjadi perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif menuntut agar masyarakat dapat berperan serta dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungannya.

Akan tetapi, kondisi yang terjadi saat ini terkadang masih menunjukkan bahwa usulan dari masyarakat dalam musrenbang belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat masih relative rendah dengan angka 24 persen Ketidak hadirannya peserta Musrenbang Desa Bantan Air. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya usulan yang tidak dilanjutkan menjadi rencana pembangunan yang tidak direalisasikan dan data notulen rapat dalam kegiatan dokumen musrenbang. Oleh karena itu, maka dirumuskanlah sebuah pertanyaan penelitian “*Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bantan khususnya Desa Bantan Air?*”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Bantan Air ?
2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Bantan Air ?
3. Sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya bidang infrastruktur daerah di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Sasaran yang perlu dipenuhi guna mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Teridentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Bantan Air.

2. Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air.
3. Terukurnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu saja diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua kepentingan yang terkait dengan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan perkuliahan terkait perencanaan partisipatif.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada penulis sehingga mampu memahami proses penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan acuan tentang pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah karena masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami kondisi lingkungannya.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian yang bermaksud untuk membatasi pembahasan terkait materi dan wilayah kajian dengan tujuan agar hasil penelitian akan menjadi tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

### **1.5.1 Ruang Lingkup Materi**

Ruang Lingkup Materi pada penelitian ini untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan terkait beberapa hal sebagai berikut:

#### **1. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Dalam penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa menggunakan teori Efendi (2002) dalam Irene yaitu bentuk Vertikal dan bentuk Horizontal. Sumber data di dapat melalui pembagian Kuesioner. Kemudian Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dan skala likert.

## 2. Faktor-Faktor Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dengan melihat faktor internal (Kesadaran/Kemauan, Pendidikan, Pendapatan) dan faktor eksternal (Pemerintah Desa dan Fasilitas). Sumber data yang didapat menggunakan Primer Kuesioner. Metode penelitian menggunakan Deskriptif kuantitatif dan skala likert.

## 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Terukurnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air. Dengan menggunakan teori Wilcox dalam Aprililla (2014;202) yaitu Informasi, Konsultasi, Keputusan Bersama, Bertindak Bersama, dan Memberikan Dukungan. Sumber data yang didapatkan wawancara dan kuesioner. Lalu menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, Skala Likert Prosedur Penerapan. Kemudian diukur dengan tingkat partisipasi teori Wilcox.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Bantan yang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang secara geografis bersebelahan dengan Kecamatan Bengkalis. Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah  $424 \text{ km}^2$ . Dengan desa terluas yaitu Selat Baru seluas  $61 \text{ km}^2$ , dan yang terkecil yaitu Muntai Barat dengan luas  $2 \text{ km}^2$  atau sebesar 0,38% dari luas keseluruhan Kecamatan Bantan.

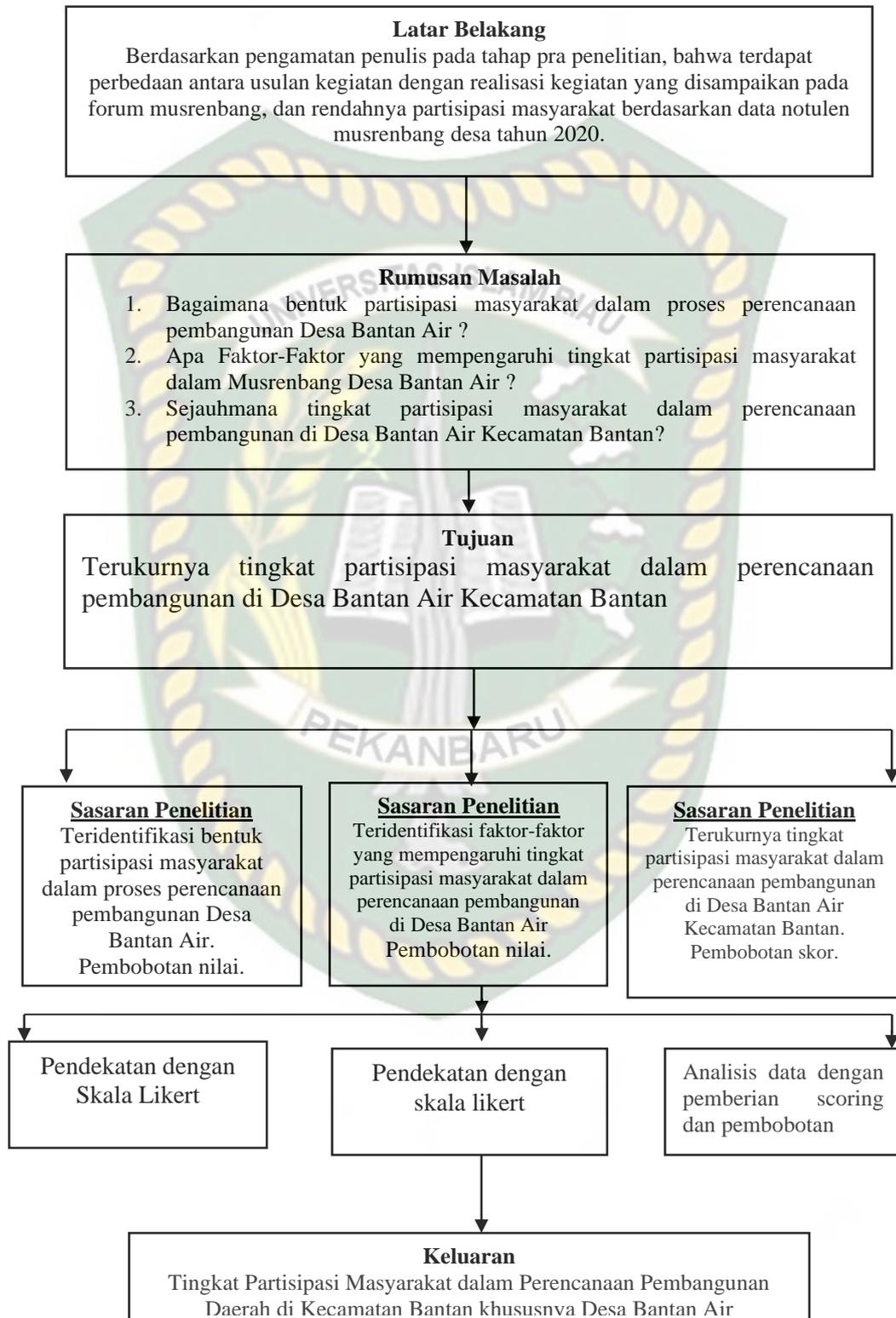
Adapun batas administrasi Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Berbatasan dengan Selat Melaka
- b. Timur : Berbatasan dengan Selat Melaka
- c. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis
- d. Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis dan Selat Melaka

Adapun wilayah yang menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah Desa Bantan Air yang merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk cukup besar di Kecamatan Bantan. Berdasarkan data dari Kantor Desa Bantan Air, luas wilayah Desa Bantan Air adalah sebesar 2.000 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.139 jiwa. Adapun batas administrasi Desa Bantan Air adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Berbatasan dengan Desa Bantan Sari
- b. Timur : Berbatasan dengan Desa Bantan Timur
- c. Selatan : Berbatasan dengan Desa Selat Baru
- d. Barat : Berbatasan dengan Desa Bantan Barat

## 1.6. Kerangka Berpikir Penelitian



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian**

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*

## 1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi tugas akhir yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan” ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan penjabaran sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berpikir penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab metodologi penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian mulai dari tahap awal penentuan topik, pengumpulan data, hingga analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian.

### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Partisipasi Masyarakat

##### 2.1.1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Soetrisno dalam Suciati (2006), partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sedangkan FAO dalam Arsito (2004) mengatakan bahwa terdapat beberapa definisi dari partisipasi, antara lain sebagai berikut.

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring* proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Mardijono dalam Cahyo (2015) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Tilaar dalam Hariyono (2010) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta berintegrasi langsung dengan tingkah laku masyarakat umum. Konsep masyarakat juga dapat diartikan adalah kumpulan manusia yang hidup bersama disuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sebuah masyarakat. Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut, khususnya melalui sumbangan bersama. Pola hubungan sosial yang berulang sifatnya seperti kegiatan gotong royong, keakrapan pergaulan ini membina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai salah satu unit sosial.

Tjokrowinoto dalam Hasibuan (2012), menyatakan alasan pembeda partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi lokal yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
- i. Partisipasi merupakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia,
- j. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal.
- k. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan wujud dari perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional dari paradigma terpusat menjadi desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, perencanaan strategis dipilih sebagai bentuk perencanaan yang digunakan untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan. Perencanaan strategis adalah usaha terarah untuk menghasilkan keputusan dan tindakan fundamental yang membentuk dan mengatur jalannya suatu organisasi atau suatu badan instansi (Bryson dalam Maulana, 2013). Selain itu, perencanaan strategis dipilih karena memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun definisi partisipasi masyarakat menurut Mikkelsen dalam Wibowo (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan tanpa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.

- c. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal tersebut.
- d. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial maupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri.

#### **2.1.2. Manfaat Partisipasi Masyarakat**

Menurut Santosa dalam Adisasmita (2006), manfaat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menuju Masyarakat yang Lebih Bertanggungjawab

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

- b. Meningkatkan Proses Belajar

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

- c. Mengeliminir Perasaan Terasing

Turut aktifnya seseorang dalam suatu kegiatan, maka akan menyebabkan seseorang itu tidak akan merasa terasing. Dengan ikut berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

d. Menimbulkan Dukungan dan Penerimaan dari Rencana Pemerintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Selain itu, juga menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

e. Menciptakan Kesadaran Politik

John Stuart Mill berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

f. Keputusan dari Hasil Partisipasi Mencerminkan Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat

Menurut Verba dan Nie dalam Adisasmita (2006) melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan kan

didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

g. Menjadi Sumber dari Informasi yang Berguna

Dalam keadaan tertentu, masyarakat sekitar akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

h. Merupakan Komitmen Sistem Demokrasi

Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan.

### **2.1.3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat**

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Conyers dalam Suciati (2006), terdapat 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting.

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena

mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal tersebut selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi (Kartasmita dalam Suciati, 2006).

Menurut Siahaan (2002), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan pada berbagai aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sosial

Keuntungan partisipasi masyarakat dalam aspek sosial adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.

b. Aspek Politik

Keuntungan partisipasi masyarakat dalam aspek politik adalah partisipasi lebih mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan

dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.

c. Aspek *Planning*

Keuntungan partisipasi masyarakat dalam aspek *planning* adalah partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.

Selain keuntungan partisipasi masyarakat diatas, keuntungan lainnya adalah adanya kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi *us*. Menurut Abe (2005), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi dan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat, (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik, (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh Nyoman Bratha dalam Fitriyani dan Yakub (2017) berikut ini :

*”Mengikutsertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa:Partisipasi adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab”.*

Mencermati kutipan tersebut, maka dapat kita ketahui ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila terpisahnya maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan. Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tidak akan pernah diwujudkan seperti yang diharapkan.

Purnamasari (2008), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu: 1) Partisipasi dalam perencanaan Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama.

Partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili masyarakat. 2) Partisipasi dalam pelaksanaan Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

#### **2.1.4. Bentuk dan Indikator Partisipasi Masyarakat**

Bentuk partisipasi masyarakat adalah bentuk-bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur

(musrenbang) di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Efendi (2002), partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal adalah partisipasi yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program dalam pihak lain. Dalam hubungan tersebut masyarakat berada sebagai posisi bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal adalah partisipasi yang terjadi pada suatu saat tidak mustahil mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Partisipasi horizontal merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1988), bentuk-bentuk partisipasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honorinya berasal dari pihak ketiga.
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat.
5. Sumbangan dalam bentuk kerja.
6. Aksi massa.
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga.
8. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

#### **2.1.5. Konsep Tingkat Partisipasi**

Tingkat partisipasi menurut Wilcox dalam Tri Wahyuni (2016) Mengemukakan bahwa terdapat lima tingkatan partisipasi, Diantaranya yaitu:

**1. Memberikan Informasi**

Information (informasi). Merupakan tingkat partisipasi paling rendah. Dalam tingkatan ini, dilakukan kegiatan terkait pemberian informasi secara lengkap dan jelas mengenai apa yang direncanakan. Sedangkan dalam kegiatan, masyarakat tidak terlibat.

**2. Konsultasi**

Consultation (konsultasi). Dalam tingkat partisipasi ini, terjadi umpan balik yang berupa konsultasi dalam menyerap aspirasi dan prioritas kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat juga belum terlibat dalam kegiatan.

**3. Pengambilan keputusan bersama**

Deciding together (pemutusan bersama). Dalam tingkat ini, diberikan dorongan kepada masyarakat untuk mencari kesepakatan melalui keputusan bersama. Namun, di dalam kegiatan, masyarakat cenderung pasif.

**4. Bertindak bersama, dan**

Acting together (kerja sama). Dalam tingkat partisipasi ini, terjadi suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Selain berkontribusi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan.

## 5. Memberikan dukungan

Supporting independent community interests. Merupakan tingkat tertinggi, dimana masyarakat diberikan kekuasaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam tingkat ini, masyarakat berperan sangat penting di setiap tahap kegiatan.

Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk mengambil kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai.

Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat yang sudah dipaparkan di atas maka dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengkaji permasalahan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Selain dari pada itu poin-poin yang dipaparkan tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dan kegagalan dalam hal partisipasi masyarakat di desa yang sedang dikaji oleh peneliti.

### 2.1.6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Al-Quran

Partisipasi berarti tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan, berpartisipasi, ikut serta, ikut mengambil bagian. Sedangkan masyarakat (muslim) adalah satu kelompok atau sekumpulan kelompok-kelompok yang mendiami suatu daerah yang beragama Islam. Jadi yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat yang

mendiami suatu daerah dalam keterlibatan emosionalnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang menimbulkan suatu perubahan atau perbaikan guna mencapai suatu tujuan yang direncanakan.

Al-Qur'an telah memberikan tuntutan kepada kita agar manusia selalu tolong menolong dalam segala kebaikan. Karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup dengan sendiri saja. Ia senantiasa membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain dalam kehidupannya. Dasar Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk saling tolong menolong adalah Q.S Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti sebagai berikut :

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

## **2.2. Faktor – Faktor Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan suatu kegiatan namun ada pula yang menghambat suatu keberhasilan kegiatan. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya pendidikan, penghasilan ataupun pekerjaan. Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor internal, yaitu (1) Kesadaran/Kemauan (2) Pendidikan dan (3) Pendapatan/Penghasilan (Dorodjatin dalam Sriwahyuni, 2017).

1. Faktor Internal yang meliputi :

a. Faktor Kesadaran / Kemauan keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang

mendorong untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

- b. Faktor Pendidikan Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan pola berfikir. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam bentuk pemberian ide dan pikiran.
- c. Faktor Penghasilan / Pendapatan setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka berikut ini akan diterangkan pula bagaimana pengaruh penghasilan/pendapatan dalam pembangunan, khususnya dalam bentuk sumbangan uang/dana. Berdasarkan penghasilan masyarakat di Desa Bantan Air yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Disamping penghasilan/pendapatannya yang tidak sama, juga tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan.

2. Faktor Ekstern yang meliputi :

- a. Kepemimpinan Pemerintah di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu faktor pendukung bagaimana untuk merangkul dan mengajak masyarakat agar bersama-sama dengan pemerintah desa agar menyatu dan bahu-membahu untuk kemajuan desa
- b. Peralatan / Fasilitas Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa tentunya berbagai fasilitas pendukung harus memadai, agar masyarakat merasa nyaman untuk ikut dan berkontribusi dengan pemerintah desa.

### **2.3. Perencanaan Pembangunan**

#### **2.3.1. Pengertian Perencanaan**

Menurut Jayadinata (1999) memberikan pengertian atas definisi perencanaan dalam bukunya *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah* bagi seorang perencana, perencanaan itu meliputi pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan. Menurut Wilson dalam Jayadinata (1999) perencanaan itu adalah suatu proses yang mengubah proses lain, atau mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencana atau orang yang diwakili oleh perencana tersebut.

Perencanaan dalam arti yang luas dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (dalam Pontoh dan Kustiwan, 2008) yang mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu; cara mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif; serta penentuan

tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses, tahapan, langkah-langkah yang harus dilalui dan dilakukan untuk mencapai produk atau hasil, sasaran, tujuan, cita-cita atau keinginan, serta mewujudkan dan merealisasikan ide-ide atau gagasan yang sudah dinyatakan sebelumnya. Selain itu, perencanaan juga dapat diartikan sebagai penyusunan serangkaian strategi, program, dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksikan akan terjadi pada masa yang akan datang.

Kegiatan perencanaan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kajian kondisi masa lalu hingga saat ini.
- b. Prediksi kondisi ke masa depan.
- c. Penetapan tujuan dan sasaran untuk masa depan.
- d. Perumusan strategi, program, dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **2.3.2. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004). Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti dilakukan untuk mencapai suatu peningkatan. Pembangunan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik.

Pembangunan fisik dapat diartikan sebagai pembangunan pada aspek-aspek fisik/ riil, pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan masyarakat seperti jalan, jembatan, gedung-gedung pelayanan, dll. Sedangkan pembangunan non-fisik lebih diartikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam cara. Pembangunan non-fisik ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kunarjo dalam Damayanti (2013) mengatakan bahwa pembangunan daerah adalah merupakan semua kegiatan pembangunan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat.

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” (Siagian dalam Melis 2016)

Selain itu, menurut Budiman (2006) pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

- a. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.

- c. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
- d. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan.
- e. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.
- f. Bahwa kelima hal tersebut diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (*Nation Building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

### 2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan kedua definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan semangat pembangunan di kawasan pedesaan, yang mengutamakan semangat tumbuh dari dalam untuk dan berkembang yang secara mandiri, tidak menunggu uluran tangan dari luar. Pergerakan pembangunan masyarakat desa tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan, melainkan menjadi subjek dalam pembangunan tersebut.

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya. Keberhasilan pembangunan ditentukan pula oleh besarnya pengertian, kesadaran, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Hariyono (2010), perencanaan pembangunan kota adalah suatu upaya mengenali potensi kota dan mengenali kota lain sebagai referensi untuk menentukan wajah kota, kemudian mengenali sumber daya yang ada dan menggerakannya, dan diimplementasikan secara bertahap biasanya dengan prioritas tertentu, dengan tujuan dan nilai tertentu pada masa yang akan datang untuk memperoleh perbaikan dibidang fisik, sosial, dan ekonomi pada umumnya. Sedangkan menurut Lewis (2009), perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Selain itu, Jhingan dalam Sjafrizal (2009) mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah senantiasa melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya. Adapun pengertian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi berpegang pada azas prioritas (Bratakusumah, 2004).

Kegiatan perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan-tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dalam ranah pembangunan daerah dilakukan mulai dari tingkat wilayah kelurahan, kecamatan, hingga kota.

## **2.4. Desa**

### **2.4.1. Pengertian Desa**

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (*community power*).

Menurut Labolo dalam Damayanti (2013), desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan semboyan. Lahirnya pelembagaan politik di tingkat lokal (desa) yang merupakan organisasi formal diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen, dan sekaligus prospektif dalam pengembangan demokrasi di tingkat desa. Komunitas desa merupakan bagian integral dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selain sebagai

tempat tinggal masyarakatnya sekaligus sebagai wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hak istimewanya yaitu adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Nilai-nilai adat inilah yang menjadi landasan bagi otonomi daerah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam wilayah kabupaten. Adapun kewenangan desa yang terdapat dalam Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan desa mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan berlaku yang belum di laksanakan oleh daerah dan pemerintah
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintahan Provinsi, dan atau Pernerintah Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa, desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNPM, 2009)

#### **2.4.2. Prinsip Perencanaan Desa**

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu perencana pembangunan desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut Lutfi dalam Yendri (2015).

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh masyarakat desa.
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintah didesa maupun pada masyarakat.
- f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal diberlakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

- k. Penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

### 2.4.3. Pembangunan Desa

Menurut Hartoyo (dalam Wahyudin, 2018), pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-rama mendiskusikan dan merencanakan serta menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan, dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya desa, dan swasembada. Sedangkan menurut Beratha (dalam Wahyudin, 2018), pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis, dan terarah sebagian penting dalam pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Berikut menjelaskan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006):

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan(*sustainable*).

- b. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
- c. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*).

Namun dalam menentukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu menurut Butterfield dalam Ndraha(dalam Wahyudin, 2018) adalah :

- a. Perbedaan Persepsi

Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dipedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang dilakukan didesanya.

- b. Kesukaran Memilih Model Pembangunan yang Tepat

Kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru sehingga pemerintah pun menjadi bingung dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.

c. Batasan Waktu

Dimana pembangunan pedesaan lambat sekali kelihatan hasilnya sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan desa.

d. Persoalan Praktis

Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tarap pelaksanaannya membuat pembangunan desa terlambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih.

Memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan di desa atau pedesaan yang sesuai dengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di suatu daerah. Masing-masing penelitian memiliki tujuan, variabel, metode, dan hasil penelitian yang berbeda-beda. Berikut Tabel 2.1 terkait penelitian terdahulu yang menjadi referensi/rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	Indra Maulana, 2013	Agus Harto Wibowo, 2009	Melis, 2016	Yulfi Yendri, 2015	Erma Damayanti, 2013	Indah Sri Wahyuni, 2018
<b>Judul</b>	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi Usulannya di Kota Surakarta	Analisis Perencanaan Partisipatif (studi kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara)	Efektifitas Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Pedesaan Melalui Organisasi Masyarakat Setempat. (Studi Kasus : Desa Pangkalan Batang Barat, Kabupaten Bengkulu)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkulu
<b>Tujuan</b>	Mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta	Mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang, Merancang model perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara	Mengetahui keefektifan perencanaan partisipatif dalam pembangunan pedesaan melalui organisasi masyarakat setempat (OMS) di Desa Pangkalan Batang Barat, Kabupaten Bengkulu.	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Mengukur tingkat partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu

<b>Objek Penelitian</b>	Partisipasi masyarakat kelurahan di dalam tahapan perencanaan pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam musrenbang hingga tahap kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Partisipasi Organisasi masyarakat setempat dalam pembangunan desa	Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan desa	Partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan musrenbang
<b>Studi Kasus</b>	Kota Surakarta	Kecamatan Pamalang Kabupaten Pamalang	Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara	Desa Pangkalan Batang Barat, Kabupaten Bengkalis	Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
<b>Metode Penelitian</b>	Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif	Kualitatif	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Dekriptif kualitatif	Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis kuantitatif dan kualitatif	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif

Sumber: Hasil Rangkuman, 2021

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Metode Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah Deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduksi itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum. Pendekatan atau metode deduktif merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Pada deduktif yang rumit peneliti bisa membuat kesimpulan lebih dari satu.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif kuantitatif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan Deskriptif kuantitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bantan Air yang merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi di Kecamatan Bantan. Jumlah penduduk Desa Bantan Air adalah sebanyak 2.139 jiwa dengan luas wilayah sebesar 2.000 Ha. Peta administrasi lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan November 2020 hingga Oktober 2021. Berikut Tabel 3.1 tentang waktu pelaksanaan penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Uraian Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Bulan					
		1	3	4	5	7	9
1.	Persiapan penyusunan proposal penelitian						
2.	Bimbingan Penyusunan proposal penelitian						
3.	Seminar proposal						
4.	Pengumpulan data						
5.	Pengolahan dan analisis data						
6.	Penyusunan laporan hasil penelitan						
7.	Bimbingan laporan hasil penelitian						
8.	Seminar hasil						
9.	Revisi seminar hasil						
10.	Seminar komprehensif						

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Gambar 3.1**

**Peta Administrasi Lokasi Penelitian**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi tidak hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bantan Air yaitu sebanyak 2.139 jiwa.

#### 3.3.2 Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposing sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi : sifat, karakteristik, ciri dan criteria sampel tertentu.

Untuk Teknik pengambilan *purposive sampling* dalam penelitian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Di Desa Bantan Air sebagai berikut :

1. Perangkat Desa yang berjumlah 5 orang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan Ketua BPD.

2. Tokoh Masyarakat yang berjumlah 17 orang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Adat, Kelompok Pemuda, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani/Nelayan, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
3. Masyarakat yang terdiri dari 30 orang terdiri dari 5 anggota masyarakat dimasing-masing Dusun yang ada di Desa Bantan Air.

Dengan demikian jumlah Purposive Sampling secara keseluruhan sebanyak 52 orang responden. Adapun alasan penulis menggunakan Purposive Sampling dengan mengambil 52 orang responden tersebut yaitu responden dikategorikan perwakilan dari komponen-komponen masyarakat yang dilibatkan dalam Musrenbang Desa Bantan Air. Kemudian situasi dan kondisi masih dalam keadaan pandemi covid 19 oleh sebab itu peneliti mengambil sampling 52 orang.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan inti dari setiap kegiatan penelitian. Pengumpulan data merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengukur informasi dari variabel-variabel yang diteliti, untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Data yang dikumpulkan oleh penelitian tergantung pada rumusan masalah/ pertanyaan penelitian dan hipotesis (Sugiyono, 2015).

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan Dokumen**

Tinjauan dokumen merupakan metode pengumpulan data secara sekunder yakni memperoleh data melalui dokumen atau arsip terdahulu. Tinjauan

dokumen yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui usulan masyarakat dan rencana pembangunan daerah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data tersebut adalah dokumen notulen musrenbang dan hasil musrenbang Desa Bantan Air.

## 2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan bersifat tertutup yang artinya jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan.

**Tabel 3.2.**

**Daftar Responden Kuesioner**

No	Responden	Jumlah
1	Tokoh Agama	5 Orang
2	Tokoh Masyarakat	1 Orang
3	Tokoh Adat	3 Orang
4	Kelompok Pemuda	2 Orang
5	Kelompok Perempuan	2 Orang
6	Kelompok Tani	2 Orang
7	Kelompok Nelayan	2 Orang
8	Organisasi Masyarakat	3 Orang
9	LPM	1 Orang

10	Pengusaha	1 Orang
11	Perwakilan setiap Dusun	30 Orang
	Total	52 Orang

Sumber : *Olahan Data 2021*

Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut :

1. Selalu Ikut (SS) diberi Skor 5
2. Pernah Ikut (PI) diberi Skor 4
3. Kadang-Kadang (KK) diberi Skor 3
4. Ikut Sebagai Pendengar (ISP) diberi Skor 2
5. Tidak Pernah Ikut (TPI) diberi Skor 1

#### **3.4.1. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat yang terlibat dengan Musyawarah Desa (Musrenbang). Juga pengumpulan data lapangan lainnya di Kantor Desa Bantan Air.
2. Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Musrenbang, Kemudian kepustakaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan arsip/laporan lainnya yang berhubungan Musrenbang Desa Bantan Air.

**Tabel 3.3**  
**Kebutuhan Data**

No.	Data	Jenis Data	Kebutuhan Data	Sumber Data
1.	Karakteristik Wilayah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kependudukan</li> <li>- Administrasi desa</li> <li>- Sarana Prasarana</li> </ul>	Kantor Desa Bantan Air
2.	Dokumen Musrenbang Desa Bantan Air Kecamatan Bantan 2020	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulen</li> <li>- Hasil musrenbang dari tahun 2018-2020</li> </ul>	Kantor Desa Bantan Air
3.	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Data keterlibatan masyarakat dalam kegiatan</li> <li>-Data status keterlibatan masyarakat</li> <li>-Data prakarsa masyarakat</li> <li>-data hubungan antar masyarakat</li> </ul>	Masyarakat
4.	Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat	Primer	Faktor Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran/Kemauan</li> <li>- Pendidikan</li> <li>- Pendapatan</li> </ul> Faktor Eksternal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Desa</li> <li>- Fasilitas</li> </ul>	Masyarakat
5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi</li> <li>- Konsultasi</li> <li>- Keputusan Bersama</li> <li>- Bertindak Bersama</li> </ul>	Masyarakat

			- Memberikan dukungan	
--	--	--	-----------------------	--

Sumber : *Olahan Data Penelitian 2021*

### 3.5. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015), Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apasaja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selain itu, variable penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau tindakan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.

**Tabel 3.4**  
**Variabel Penelitian**

No.	Sasaran	Variabel	Sumber Data	Metode Analisis
1.	Teridentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Bantan Air. Pembobotan Nilai	- Bentuk partisipasi Menurut Efendi (dalam Irene, 2015:58), partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal;	Primer: Kuesioner	Deskriptif Kuantitatif Skala Likert
2.	Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air. Pembobotan Nilai.	Faktor Internal - Kesadaran/Kemampuan - Pendidikan - Pendapatan Faktor Eksternal - Pemerintah Desa - Fasilitas	Primer Kuesioner	Deskriptif Kuantitatif Skala Likert

No.	Sasaran	Variabel	Sumber Data	Metode Analisis
3.	Terukurnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Pembobotan Skor	-Informasi -Konsultasi -Keputusan Bersama -Betindak Bersama -Memberikan dukungan	Primer: Wawancara Kuesioner	Deskriptif Kuantitatif Skala Likert Prosedur Penerapan

Sumber: *Olahan Data Penelitian 2021*

### 3.5.1. Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat

Analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Bantan Air dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dan dengan pendekatan Skala Likert untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Sebagai variabel bentuk-bentuk partisipasi masyarakat digunakan teori efendi diantaranya partisipasi berbentuk vertikal dan partisipasi horizontal sebagai indikator digunakan masyarakat terlibat hanya sebagai bawahan dan masyarakat mempunyai prakarsa. Data akan diperoleh dengan pendekatan survey, kuesioner dan hasil skala likert akan dianalisis untuk menentukan bentuk partisipasi masyarakat.

### 3.5.2. Analisis Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Analisis faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan alat ukur skala likert, data diperoleh melalui kuesioner untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal

meliputi kesadaran dan kemauan, pendidikan dan pendapatan. Sementara faktor eksternal meliputi pemerintah desa dan fasilitas desa. Hasil pengukuran skala likert akan dianalisis dengan pemberian skoring untuk mendapatkan persentase faktor-faktor yang mempengaruhi.

### **3.5.3. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan dilakukan dengan pendekatan teknik deskriptif kuantitatif dan prosedur penerapan. Dalam penelitian ini tingkat partisipasi ini dilihat dari teori menurut wilcox terdiri atas konsultasi, pengambilan keputusan, bertindak bersama dan memberikan dukungan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi hasil pengukuran dengan skala likert akan diberikan penilaian dengan skoring dan pembobotan.

### **3.6. Analisa Data**

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan alat analisis deskriptif kuantitatif skala likert. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Nazir (2005) bahwa skala likert digunakan untuk mengukur persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Adapun skala likert dimaksud menggunakan prosedur penerapan sebagai berikut:

1. Mentabulasi jawaban responden.
2. Menghitung batas nilai awal dan nilai akhir dengan mencari indeks minimal, indeks maksimal serta interval dengan rumus sebagai berikut:

- a. Indeks Minimal =  $Bt \times P \times n$
- b. Indeks Maksimal =  $Bb \times P \times n$
- c. Interval =  $\frac{Imax - lmin}{Jumlahindeks}$

Keterangan:

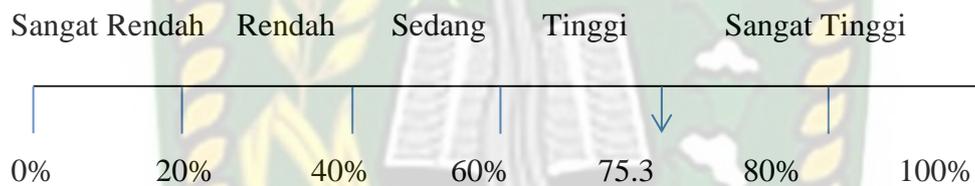
Sb = Skor Tertinggi

Bt = Skor terendah

P = Variabel yang diteliti

n = Jumlah responden

3. Membuat skala likert sebagai berikut:



Sumber : Nazir 2005

Keterangan :

- 81- 100% (ST) = Partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori sangat tinggi.
- 61- 80% (T) = Partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori tinggi.
- 41- 60% (S) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori sedang
- 21- 40% (R) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori rendah
- 0-20% (SR) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori sangat rendah.

Tahapan analisis data merupakan tahap yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi yang diperoleh melalui olahan data yang dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diketahuilah tingkat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Berikut adalah table 3.5 Analisis Pendekatan Penelitian.

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pendekatan Penelitian**

No.	Analisis	Metode	Uraian	Hasil
1.	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Analisis Deskriptif Kuantitatif Skala Likert	Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pada kegiatan musrenbang.	Persentase mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.
2.	Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat	Kuantitatif Skala Likert	Menganalisis faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Faktor-faktor partisipasi masyarakat.
3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Deskriptif Kuantitatif Skala Likert Prosedur Penerapan	Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pada kegiatan musrenbang.	Besarnya tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan tingkatan partisipasi menurut wilcox.

Sumber : Olahan Data Penelitian 2021

**Tabel 3.6**  
**Desain Penelitian**

No.	Sasaran	Variabel	Indikator	Pendekatan	Metode Pengambilan Data	Keluaran
1.	Teridentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Bantan Air	-Bentuk partisipasi Menurut Efendi (dalam Irene,2015:58), partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.	- Masyarakat terlibat hanya sebagai bawahan. - Masyarakat mempunyai prakarsa.	Deskriptif Kuantitatif Skala Likert	- Survey - Kuesioner - Pembobotan Nilai	Diketahuinya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Bantan Air berdasarkan variabel penelitian.
2.	Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air	Faktor Internal Faktor Eksternal	Faktor Internal - Kesadaran/Kemauan - Pendidikan - Pendapatan Faktor Eksternal - Pemerintah Desa - Fasilitas	Deskriptif Kuantitatif Skala Likert	- Kuesioner - Wawancara - Pembobotan Nilai	Dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi perencanaan pembangunan desa
3.	Terukurnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan menurut Wilcox dalam Tri Wahyuni (2016)	- Memberikan informasi - Konsultasi - Pengambilan keputusan - Bertindak bersama - Memberikan dukungan	Deskriptif Kuantitatif Skala likert Prosedur Penerapan	- Kuesioner - Wawancara - Pembobotan Skor	Diketahuinya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan.

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

##### 4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis

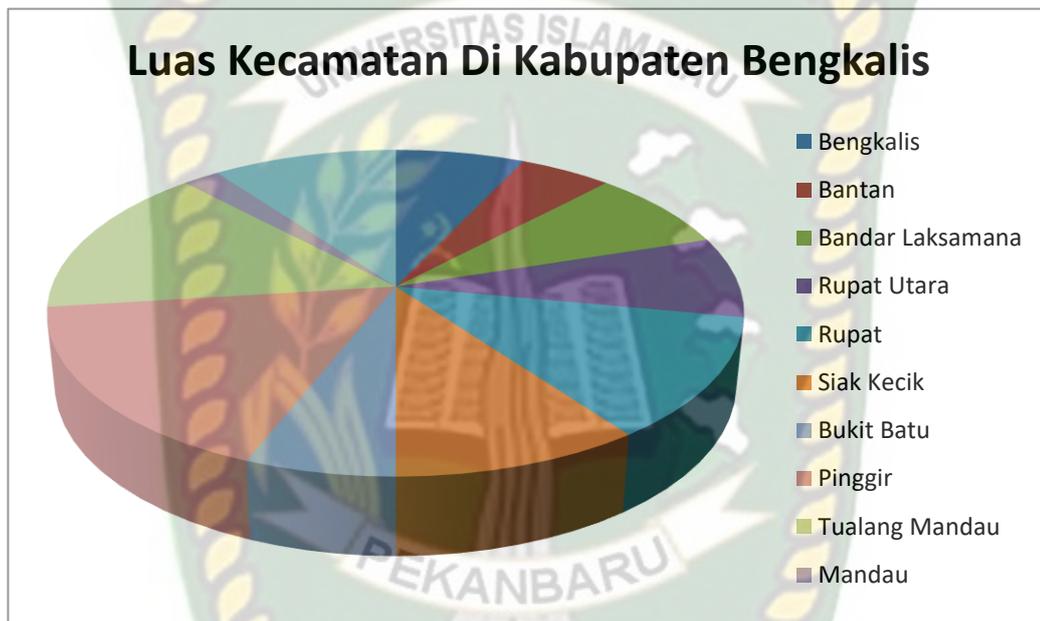
Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 11.481,77 km<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak.
3. Sebelah Barat dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun dan Pelalawan.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km<sup>2</sup> yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2016 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan. Adapun kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara terletak di Pulau Rupert, Kecamatan Bukit Batu,

Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera. Adapun luas kecamatan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut ini:



Sumber : Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan yang terluas di Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan Pinggir sebesar 17 % dan Kecamatan yang memiliki luas paling terkecil yaitu berada di Kecamatan Rupert sebesar 2 %. Sementara itu, untuk mengetahui ibu kota kecamatan, jumlah kelurahan/ desa dan luas wilayah dari masing-masing kecamatan dapat dilihat di lihat dari tabel 4.1. berikut ini

**Tabel 4.1.****Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis**

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah	
					Km2	Persentase
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	514.00	6.61
2.	Bantan	Selat Baru	-	23	424.40	5.46
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	488.00	6.28
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	640.00	8.23
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	742.21	9.55
6.	Mandau	Air Jamban	8	3	180.00	2.32
7.	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	757.47	9.74
8.	Pinggir	Pinggir	2	8	1.332.00	17.13
9.	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.171.00	15.06
10.	Rupat	Batu Panjang	4	12	896.35	11.53
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	628.50	8.08
Total Keseluruhan			18	137	7.773.93	100.00

Sumber : Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

**4.1.2. Sejarah Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut Kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 2.503 Km<sup>2</sup> (32,20%) Dan Kcamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km<sup>2</sup> (5,46%). Jarak terjauh antara Ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. sedangkan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selatbaru, dan Ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai, diantara sungai yang ada didaerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km, dengan letak geografi dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau disekitar Selat Melaka dan darat Sumatera serta beberapa sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim

tersebut terdiri dari musim panas dan kemarau, kemarau yang terjadi pada bulan Februari-September sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September-Januari.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat digambarkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km<sup>2</sup> belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang besar pula dibandingkan dengan Kecamatan yang memiliki luas wilayah < 1.000 Km<sup>2</sup>. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembangan, kegiatan aktivitas ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagai factor lainya yang turut mempengaruhi.

## **4.2. Keadaan Umum Kecamatan Bantan**

### **4.2.1. Keadaan Geografis Kecamatan Bantan**

Kecamatan bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada dipulau bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 Km<sup>2</sup> . Secara geografis terletak pada posisi 201<sup>o</sup> .00 Lintang Utara – 102<sup>o</sup> 30'29" dan 10 .15 Bujur Timur - 1 0 36'43" Lintang Utara. Bentuk wilayah Kecamatan Bantan berbentuk datar sampai berombak.

Kecamatan Bantan memiliki 23 desa. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 Meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 26 0 C – 30 0 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189.1 M2 / Tahun.

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah 424 km<sup>2</sup>, dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km<sup>2</sup>

atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 km<sup>2</sup> (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km<sup>2</sup> (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibu kota kecamatan Bantan.

Kecamatan Bantan terdiri dari 23 Desa dan mempunyai sembilan Desa yang sudah definitif, yaitu desa Teluk Lancar, Kambung Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan Air, Bantan Tengah, Selat Baru, Bantan Tua dan Jangkang. 23 desa tersebut yaitu Bantan Tengah, Bantan Air, Bantan Tua, Teluk Pambang Selat Baru, Teluk Lancar Kambung Luar, Jangkang Muntai, Resam Lapis, Berancah, Ulu Pulau mentayan, Pambang Pesisir Suka Maju, Pambang Baru, Kambung Luar, Pasiran, Bantan Sari Bantan Timur, Teluk Papal, Muntai Barat, dan Deluk. Dari 23 desa tersebut Selat Baru mempunyai jumlah Penduduk Terbanyak dari 23 Desa. Sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2.**

**Daftar Pembagian Wilayah Kecamatan Bantan**

No	Desa/ Kelurahan	RT/RW	Laki Laki	Perempu an	Jumlah	Jumlah KK
1.	Bantan Tengah	23/15	1.699	1.644	3.343	1.012
2.	Bantan Air	26/12	1.109	1.030	2.139	689
3.	Bantan Tua	15/6	1.400	1.329	2.729	761
4.	Teluk Pambang	18/6	654	673	1.327	475
5.	Selat Baru	36/15	2.195	2.032	4.227	1.258
6.	Teluk Lancar	23/4	1.060	983	2.043	572
7.	Kambung Luar	21/8	1.205	1.088	2.293	670
8.	Jangkang	16/8	1.265	1.112	2.377	670
9.	Muntai	16/6	984	870	1.854	542
10.	Resam Lapis	17/7	792	791	1.583	463
11.	Berancah	35/13	1.475	1.343	2.818	788
12.	Ulu Pulau	22/10	881	796	1.677	490

1	2	3	4	5	6	7
13.	Mentayan	16/6	581	539	1.120	348
14.	Pambang Pesisir	25/6	696	686	1.382	377
15.	Sukamaju	39/10	1.140	1.031	2.171	572
16.	Pambang Baru	16/6	792	707	1.499	444
17.	Kembung Baru	22/7	945	875	1.820	468
18.	Pasiran	19/6	637	605	1.242	339
19.	Bantan Sari	15/6	577	555	1.132	300
20.	Bantan Timur	20/8	807	722	1.529	418
21.	Teluk Papal	25/11	1.129	981	2.110	591
22.	Muntai Barat	19/5	438	406	844	238
23.	Deluk	15/7	693	611	1.304	349
Jumlah		508/188	23.153	21.409	44.563	12.834

**Sumber : Pemerintah Kecamatan Bantan**

### **4.3. Keadaan Umum Desa Bantan Air**

#### **4.3.1. Keadaan Geografis Desa Bantan Air**

Desa Bantan Air merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang mempunyai jumlah penduduk 2.139 jiwa atau 689 KK dengan luas daerah 2000 H, yang terdiri dari 6 dusun.

Batas Wilayah Desa Bantan Air adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Tengah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muntai

Jumlah penduduk Desa Bantan Air Kecamatan Bantan di tahun 2020 Menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya. Adanya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam satu wilayah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara terutama dalam meningkatkan produksi.

### 4.3.2. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

#### 1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 4.3**

**Sarana Pendidikan**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD	6
3.	SMP	1
4.	SMU	-
5.	MA	1
6.	SMK	1
7.	Perguruan Tinggi	-

Sumber : *Pemerintah Desa Bantan Air*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan sarana pendidikan penduduk yang terbanyak adalah sarana dan prasarana tingkat Sekolah Dasar, sedangkan SMU dan Perguruan Tinggi belum ada, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan didesa bantan air masih tergolong rendah atau masih tahapan pembangunan. Sarana pendidikan yang ada didesa

bantuan air perlu perhatian khusus dari pemerintahan dan harus ditingkatkan untuk menunjang prestasi bagi generasi selanjutnya didesa bantuan air Kecamatan Bantan.

## 2. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Kebebasan beragama di Negara Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, dan tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat desa bantuan air adalah Agama Islam. Walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama mayoritas ke agama minoritas. Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Islam	2000	93.50%
2.	Kristen	9	0.50%
3.	Katolik	-	0.00%
4.	Buddha	130	6.00%
Jumlah		2.139	100.0%

Sumber : *Pemerintah Desa Bantan Air*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat klasifikasi penduduk Desa Bantan Air berdasarkan agama penduduknya yang menganut agama islam 2000 jiwa

93.50%. Kristen 9 jiwa atau 0.50%, untuk agama katolik tiada penganut yang terdapat didesa bantan air atau 0.00% dan Buddha 130 jiwa atau 6.00%. demikian dapat diketahui bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana tempat peribadatan ini, selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengkomunikasikan pesan - pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari lima agama yang dianut masyarakat desa bantan air yang disebutkan sebelumnya, ternyata tidak semua yang memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Sarana Ibadah Di Desa Bantan Air**

No	Sarana Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah
1.	Masjid	2
2.	Musholla	3
3.	Gereja	1
4.	Vihara	1
Jumlah		7

Sumber : *Pemerintah Desa Bantan Air*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana ibadah yang terdapat sarana ibadah untuk umat Islam dengan jumlah 2 Masjid dan 3 Musholla. Kemudian terdapat 1 gereja dan 1 Vihara. Sarana Ibadah umat Islam lebih banyak hal ini dikarenakan dominasinya masyarakat yang beragama Islam.

### 4.3.3. Karakteristik Masyarakat Desa Bantan Air

#### 1. Sosial

Masyarakat desa bantan air terdiri dari beberapa suku, suku aslinya jawa. Sedangkan pendatang adalah suku melayu, batak dan etnis Cina. Keempat suku ini mewarnai dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga adat istiadat masing - masing suku saling menghormati adat dan kepercayaan yang dianut setiap golongan. Selain dari pada itu mereka selalu mengkombinasikan adat istiadat yang dimiliki dalam suatu acara tertentu seperti acara pernikahan, sunatan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah keagamaan dan yang lainnya masyarakat Desa Bantan Air tidak lepas dari arahan atau keikutsertaan tokoh - tokoh masyarakat. Dan yang paling menonjol adalah hajatan atau bakti sosial mereka saling membantu satu sama lain.

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku**

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase
1.	Jawa	1350	60.00%
2.	Melayu	650	30.00%
3.	Cina	130	6.07%
4.	Batak	9	3.03%
Jumlah		2.139	100%

Sumber : *Pemerintah Desa Bantan Air*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Bantan Air secara umum banyak menganut suku jawa berjumlah 1.350 orang dengan persentase 60.00 persen, sedangkan melayu 650 orang dengan angka 30.00 persen,

sedangkan suku cina 130 orang dengan angka 6.07 persen, sedangkan yang paling sedikit yaitu suku Batak berjumlah 9 orang dengan angka 3.03 persen.

## 2. Ekonomi

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada umumnya mempunyai mata pencarian petani dan wira usaha sebagian masyarakat mempunyai waktu luang setelah bekerja tani, kemudian waktu luang tersebut digunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti berdagang, membuka Home Industri, Ukm, nelayan, tukang dan jasa untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk desa bantan air dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**  
**Desa Bantan Air**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1500	70.12%
2.	Pedagang	580	27.11%
3.	Industry/Kerajinan	5	0.23%
5.	Jasa	50	2.33%
6	Lain-lain	4	0.18%
Jumlah		2.139	100.000%

Sumber : Pemerintah Desa Bantan Air

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Bantan Air pada umumnya adalah petani dengan jumlah 1500 orang dengan angka 70.12 persen. dan mata pencarian masyarakat yang paling sedikit adalah lain-lain dengan jumlah 4 orang dengan 0.18 persen.

**Tabel 4.8**

**Luas kebun dan hasil produksi pada tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Luas ( Ha)	Hasil Produksi (Ton)
1.	2018	159.72	5.760.76
2.	2019	128. 12	3.439. 44
3.	2020	97.22	2.493.32

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas lahan kelapa di Desa Bantan air pada tahun 2018 adalah 159,24 ha dengan hasil produksi 5.760.76 ton, pada tahun 2019 luas lahan kelapa mengalami penyusutan yaitu 128,12 ha dengan hasil produksi 3.493.44 ton, dan pada tahun 2020 lahan kelapa berkurang menjadi 97.22 dengan hasil produksi 2.493.32 ton.

**3. Kehidupan Masyarakat Desa Bantan Air**

Masyarakat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa. Desa Bantan Air Kecamatan Bantan dihuni oleh berbagai suku diantaranya adalah suku Jawa, Suku Asli, Suku Melayu dan lain-lain. Namun, Di Desa Bantan Air di dominasi oleh suku Jawa.

Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat di Desa Bantan Air menggunakan bahasa Jawa Tulean. Namun, masih fasih dalam berbahasa Melayu karena di Pulau Bengkalis mayoritasnya menggunakan bahasa Melayu.

#### **4. Budaya**

Kebudayaan yang ada di Desa Bantan Air masih termasuk tradisional. Walaupun termasuk tradisional, namun kebudayaan modern juga sudah mulai diterima oleh penduduk Desa Bantan Air. Hubungan penduduk dengan alam yang masih sangat kuat dalam budaya pemanfaatan potensi alam, sehingga penduduk masih menjaga kebudayaan tradisional serta nilai-nilai kearifan lokal Desa Bantan Air.

Meskipun kebudayaan modern sudah mulai masuk dengan adanya alat industri, alat transportasi, alat komunikasi, bahkan sudah ada warung internet, namun penduduk Desa Bantan Air masih menjaga kebudayaan tradisional. Hal tersebut dibuktikan masih adanya perkumpulan-perkumpulan kesenian seperti terdapat 3 kelompok perkumpulan jatilan dan 1 kelompok perkumpulan kesenian Mocopat. Selain itu masih adanya beberapa tempat dan benda-benda yang dianggap keramat oleh penduduk setempat sehingga masih dilakukannya ritual-ritual sesaji dan sebagainya.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Proses Perencanaan Pembangunan Desa.

Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat dalam musrembang desa sangat berpengaruh, semakin tinggi orang atau masyarakat yang menghadiri rapat, maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan. Berbagai bentuk partisipasi atau kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses rapat atau musyawarah rencana pembangunan desa, hal tersebut menunjukkan peran aktif serta keterlibatan masyarakat dalam rapat. Misalnya menyumbangkan berbagai ide-ide, sebuah gagasan, atau mengajukan usul, serta memberikan saran-saran dalam rapat desa, sehingga terjadi komunikasi melalui dialog antar masyarakat dengan perangkat desa yang memberikan tanggapan atau kritik terhadap masalah-masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan.

Hal tersebut penting dilakukan oleh masyarakat karena dengan ikutnya mereka berpartisipasi dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan, maka masyarakat dapat menentukan sendiri arah kebijakan program-program pembangunan yang akan dilakukan nantinya bersama dengan pemerintah desa setempat secara musyawarah dengan baik.

##### 5.1.1. Identifikasi Proses Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa.

Salah satu tugas Pemerintahan Desa adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya, baik pembangunan fisik

atau pembangunan sumberdaya masyarakat yang bersifat non fisik. Rencana pembangunan Desa didiskusikan dalam suatu forum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tokoh atau organisasi kemasyarakatan dan dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Forum yang membahas rencana pembangunan desa ini lebih dikenal dengan Musyawarah Pembangunan Desa atau bisa disebut Musrenbangdes.

Perencanaan merupakan suatu tahapan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan di masa depan secara tepat dengan berdasarkan pada kegiatan yang menjadi prioritas dan menyesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia. Forum perencanaan pembangunan di Desa yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbangdes merupakan suatu wadah untuk masyarakat dalam memberikan aspirasi dan ide-ide nya kepada pemerintah desa mengenai pembangunan yang hendaknya dilakukan di desanya untuk jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Terdapat dua macam Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu Musrenbangdes yang membahas RKPDes dan Musrenbangdes yang membahas RPJMDes. Maka dari itu peneliti ingin mengidentifikasi seperti apa usulan-usulan masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan di Desa Bantan Air.

### **1. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang)**

Musrenbang desa adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di desa setempat dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan

Musrembang desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrembang desa yang dilaksanakan.

Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan) Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan diantaranya adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa/Kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan dan tantangan nyata yang sedang dan akan dihadapi.

Kemudian tujuan dari diselenggarakan Musrenbang desa antara lain sebagai berikut:

1. Menampung aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai oleh APBD Desa, alokasi dana Desa, APBD Kabupaten atau sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang di Desa Bantan Air terdiri dari tahapan :

1. Tahapan persiapan, dengan Kegiatan sebagai berikut :

Kepala Desa Bantan Air menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa dengan mengemban tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
- b) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.
- c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
- d) Mendaftar calon peserta Musrenbang.
- e) Membantu para delegasi Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang.
- f) Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Desa/Kelurahan.
- g) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- h) Menyebarkan dokumen rencana kerja pembangunan Desa/Kelurahan.

2. Tahapan pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pendaftaran peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa Bantan Air.
- b) Pemaparan Camat Bantan atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.

- c) Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
- d) Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa oleh Kepala Desa.
- e) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi dana Desa.
- f) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, P3A dan lain-lain.
- g) Pemisahan kegiatan berdasarkan : Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa, dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- h) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- i) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang.
- j) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk Menghadiri Musrenbang Kecamatan.

Dalam hal kondisi apapun misalkan dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa tetap harus dilaksanakan. Karena Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang paling bawah untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai perencanaan pembangunan apa yang diinginkan sehingga bisa dijadikan prioritas kegiatan tahunan.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berisi :
  - a) Prioritas kegiatan pembangunan skala Desa yang akan didanai oleh APBDes, hibah dan atau swadaya.
  - b) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD.
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
3. Berita acara Musrenbang Desa.

Peserta Musrenbang Desa adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kelompok masyarakat miskin, perwakilan kelompok Perempuan dan lain-lain. Sedangkan narasumber dalam Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, ketua dan para anggota BPD, camat dan aparat kecamatan, Kepala sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di Desa dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Setelah diperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa serta sumber pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Desa dari APBD maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, dapat dianalisa bahwa penetapan prioritas program/kegiatan yang diusulkan oleh warga pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur maupun keagamaan.

Penetapan prioritas program usulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa/kelurahan yang sedang dihadapi, program kegiatan pembangunan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya dan juga berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Hasil dari penetapan usulan prioritas program tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut pada forum yang sama.

## **2. Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang)**

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah yang dilakukan oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan) kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas

Desa/Kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten pada tahun berikutnya.

Tujuan musrenbang kecamatan diselenggarakan adalah untuk :

- a) Membahas dan menyetujui hasil-hasil *musrenbang* dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
- c) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

**1. Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :**

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dan tugas dari Tim Penyelenggara adalah sebagai berikut :

- a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
- b) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan.
- c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar

peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

- d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan.

## 2. Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- b) Pemaparan camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- c) Pemaparan mengenai Rancangan Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh kepala-kepala cabang SKPD atau pejabat SKPD dari Kabupaten.
- d) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD menurut tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- e) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- f) Pembagian peserta musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD yang tercantum.

Kesepakatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang kecamatan namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan)

- g) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD.

Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

- h) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- i) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan ada butir 7, sehingga camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD ditingkat Kabupaten. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan. Adapun keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Musrenbang Kecamatan adalah :

1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.
2. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
3. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan

Dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan, peserta yang mengikuti adalah wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi petani, organisasi pengrajin dan lain sebagainya). Sedangkan yang menjadi Narasumber pada Musrenbang Kecamatan adalah, dari kabupaten: Bappeda, perwakilan SKPD dari Kabupaten, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, serta dari kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan, melakukan berbagai tugas untuk mencapai kelancaran pelaksanaan Musrenbang, tugas tersebut antara lain :

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang tahunan Kecamatan.
4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.
5. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
6. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) prioritas kegiatan yang disepakati dan b)daftar nama delegasi yang terpilih.
7. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada Anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, dapat dianalisa bahwa penetapan prioritas program kegiatan tingkat kecamatan tetap mengacu pada hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan yang diadakan sebelumnya, namun tidak semua usulan program kegiatan yang ditetapkan ditingkat desa/kelurahan juga disepakati dan ditetapkan di tingkat kecamatan. Terdapat beberapa usulan yang belum dapat disepakati dengan pertimbangan bahwa usulan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Hasil penetapan usulan program ditingkat

kecamatan selanjutnya akan dibawa ke forum SKPD untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing SKPD.

### **3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten**

Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang dilakukan dengan tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD memperhatikan masukan ide, kegiatan dari tingkat kecamatan, kemudian kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, bisa pelaksanaan forum SKPD dan atau forum Gabungan SKPD tetap dilakukan. Jumlah Forum di SKPD dan Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi aktual. (Agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk).

Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum GabunganSKPD pada fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat serta SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten tersebut. Sebagai contoh: Forum

SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Infrastruktur atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, perdagangan dan koperasi dan sebagainya.

Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Renja-SKPD.
2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD.

#### **5.1.2. Rencana Kegiatan Pembangunan**

Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap usulan dan aspirasi masyarakat desa. Sehingga, kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah digunakan untuk kesejahteraan desa dengan berbagai program pembangunan yang mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka, desa diminta untuk memberikan usulan melalui Musrenbangdes. Pembangunan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan wewenangnya, dengan tetap mengacu pada regulasi dan program pemerintah.

Musrenbangdes mesti dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan desa terkait penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Selain itu usulan kabupaten/provinsi dasarnya dari usulan dan kebutuhan desa yang perlu direalisasikan.

### **1. Rencana Pembangunan Tahun 2018**

Usulan-usulan masyarakat Desa Bantan Air pada tahun 2018 memiliki usulan-usulan yang berhasil di realisasikan seperti Semenisasi Jalan yang berada di lokasi Jl. Sumber Rejo Menuju Desa Bantan Sari yang merupakan jalan penghubung antar desa yang sangat di minta oleh masyarakat desa. Kemudian di Jl. Suka Maju yang memang sebelumnya keadaan sudah rusak berhasil direalisasikan. Semenisasi Jalan berhasil dikerjakan oleh Pemerintah Desa dan dibantu dengan anggaran Kabupaten Bengkalis.

Kemudian usulan yang berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Desa Bantan Air ialah Peningkatan Jalan. Jalan Jawa dan Jalan Wonosari merupakan jalan utama Desa Bantan Air yang sudah rusak parah sebelumnya, jalan yang penuh dengan batuan kerikil membuat jalan utama dengan penuh debu dan membuat masyarakat tidak nyaman melewatinya. Usulan masyarakat ini menjadi prioritas Pemerintah Desa di tahun 2016-2017 kemudian anggaran pembangunan peningkatan jalan di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun, Pembangunan ini berjalan secara bertahap-tahap.

Selanjutnya ada pembangunan pintu klip parit yang direalisasikan pada tahun 2018. Pembangunan ini bertujuan agar saluran parit utama Desa Bantan Air tetap terjaga. Pembangunan selanjutnya ialah Turap Parit salah satu permasalahan

utama di Desa Bantan Air pengikisan parit-parit. Masyarakat mengharapkan pembangunan ini agar tidak meluas ke rumah masyarakat. Pembangunan tersebut berhasil di realisasikan di tahun 2018 yang dibantu dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Desa Bantan Air juga rehabilitas Masjid utama di Desa Bantan Air yaitu Masjid At-Taqwa seperti Pekerjaan lantai keramik masjid dan Pekerjaan dinding keramik. Kemudian ada pergantian bola lampu penerangan jalan utama Desa Bantan Air.

Dari penjelasan di atas merupakan usulan-usulan masyarakat Desa Bantan Air yang direalisasikan pada tahun 2018. Usulan-usulan berhasil direalisasikan dari anggaran pemerintah kabupaten maupun dibantu dengan anggaran dana desa. Namun, ada beberapa usulan-usulan masyarakat yang tidak terakomodir pada tahun 2018 yang menurut masyarakat Desa Bantan Air hal tersebut sangat urgensi yaitu Pembangunan Pemecah gelombang untuk mengatasi abrasi pantai di Desa Bantan Air. Kerusakan parah sudah terjadi di bibir pantai Desa Bantan Air namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mengupayakan untuk merealisasikan usulan masyarakat Desa Bantan Air. Padahal usulan-usulan masyarakat yang paling utama ialah pembangunan pemecah gelombang pantai.

Melihat usulan-usulan tersebut tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan-usulan ditahun 2018 sangat tinggi, dikarenakan masyarakat melihat banyak permasalahan-permasalahan di desa yang perlu dianggarkan untuk pembangunan. Namun, kenyataannya usulan-usulan masyarakat banyak yang tidak dilanjutkan atau tidak berhasil di realisasikan. Ini menjadi catatan penting agar Desa Bantan Air memprioritaskan dan mengusahakan pembangunan penting.

**Tabel 5.1**  
**Kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan Masyarakat**  
**Periode Tahun 2018**

Tahun	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan
2018	Pembangunan Pemecah Gelombang	-	-
	Semenisasi Jalan	-Jl. Sumber Rejo Menuju Desa Bantan Sari -Jl. Suka Maju	- 140m x 5.5m x 0,2m = 154 m <sup>3</sup> . - 265 m x 3,0 m. x 0.10 m
	Peningkatan Jalan	- Peningkatan Jl. Jawa - Peningkatan Jl. Wonosari	-200 m -150 m
	Pembangunan Pintu Klib Parit	- Jl. Suka Maju	1 Unit
	Pembangunan Kanal Bloking Parit	-	-
	Pembangunan Turap Parit	-	-
	Rehabilitasi Musholla	-	-
	Rehabilitasi Masjid	- Masjid At- Taqwa	- Pekerjaan lantai keramik masjid - Pekerjaan dinding keramik
	Penambahan Listrik	-	-
	Penerangan Lampu Jalan	Lampu Jalan Damai	- Ganti Bola Lampu
	Pembangunan Rumah Layak Huni	-	-
	Rehabilitasi Sekolah	-	-
Pembangunan Posyandu/Pos	-	-	

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021

## 2. Rencana Pembangunan Tahun 2019

Usulan-usulan masyarakat pada tahun 2019 Desa Bantan Air melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Forum musyawarah tahunan ini para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat desa untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah desa Bantan Air yang didasarkan pada masukan dari hasil musyawarah Dusun serta menyepakati rencana kegiatan lintas Dusun di desa Bantan Air. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat guna pembangunan desa Bantan Air tahun anggaran 2019. Berikut ini adalah usulan-usulan yang berhasil dijaring saat pelaksanaan Musrenbangdes:

Semenisasi jalan dan peningkatan jalan berhasil direalisasikan di tahun 2019. Semenisasi lanjutan di jalan Budi dan peningkatan Maskur dan Jalan Tegal sari ini disambut baik oleh masyarakat Desa Bantan Air, rasa terimakasih dari pemerintah kabupaten bengkalis kepada pemerintah desa atas kerja keras sehingga akses masyarakat semakin lancar. Namun, masyarakat desa beranggapan bahwa akses penghubung masih menjadi kebutuhan prioritas yang harus di penuhi di Desa Bantan Air. Dengan adanya akses penghubung maka kesulitan masyarakat akan semakin teratasi. Keberhasilan pemerintah desapun dapat diukur dari realiasi pembangunan dari usulan-usulan masyarakat.

Kemudian ada rehabilitasi Masjid Baiturohchim di dusun 05 Desa Bantan Air. Rehabilitasi Masjid dalam proses pembangunan ini adalah semenisasi pakiran masjid, Penambahan Kran Air Wudhu dan penambahan microfon 2 unit. Masjid Baiturohchim ialah masjid utama di Desa Bantan Air. Segala kegiatan beragama

islam dilaksanakan di masjid ini. Terakhir adalah rehabilitasi sekolah yang berhasil direalisasikan di tahun 2019 perbaikan atap sekolah dan menggantikan bangku sekolah yang sudah rusak.

Untuk penggunaan anggaran usulan-usulan yang berhasil direalisasikan perencanaan pembangunan desa bantam air berasal dari anggaran dana desa Bantam Air dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Anggaran dana desa mampu merealisasikan renovasi yang ada di Masjid dan Kemudian pembangunan yang lainnya di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah tabel Usulan-usulan dan yang berhasil direalisasikan pembangunan pada tahun 2019 :

**Tabel 5.2**  
**Kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan Masyarakat**  
**Periode Tahun 2019**

Tahun	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan
2019	Pembangunan Pemecah Gelombang	-	-
	Semenisasi Jalan	- Jl. Budi	- 890x1 meter
	Peningkatan Jalan	- Peningkatan Jl. Maskur - Peningkatan Jl. Tegal Sari	- 200 m - 180m
	Pembangunan Pintu Klib Parit	-	-
	Pembangunan Kanal Bloking Parit	-	-
	Pembangunan Turap Parit	-	-
	Rehabilitasi Musholla	-	-
	Rehabilitasi Masjid	-Masjid Baiturohhim	-Semenisasi Parkiran Masjid -Penambahan Kran Air Wudhu - Microfon 2 unit
	Penambahan Listrik	-	-
	Penerangan Lampu Jalan	-	-
	Pembangunan Rumah Layak Huni	-	-
	Rehabilitasi Sekolah	SDN 24 Desa Bantan Air	- Perbaikan Atap Sekolah - Menggantikan Bangku Belajar
	Pembangunan Posyandu/Pos	-	-

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021

### 3. Rencana Pembangunan Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa.

Untuk usulan-usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Bantan Air pada tahun 2019 sebelumnya dan kemudian di realisasikan pada tahun 2020 ini tidak begitu banyak dikarenakan anggaran banyak yang berubah disebabkan oleh adanya covid 19. Seharusnya ada kegiatan pembangunan yang usulan masyarakat berhasil dilaksanakan menjadi tertunda pembangunannya. Penyebab utama anggaran pembangunan dialokasikan ke anggaran covid 19. Tidak hanya pembangunan yang tertunda di gantikan dengan pemberian sembako kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan tabel 5.3. Kegiatan Pembangunan yang di usulkan masyarakat desa Bantan Air pada tahun 2020 ialah bahwa beberapa kegiatan dilaksanakan seperti Rehabilitasi Musholla dan Pembangunan Posyandu/Pos.

Tidak ada kegiatan yang terlihat berhasil dilaksanakan oleh pemerintah desa Bantan Air dikarenakan oleh perubahan anggaran di alihkan ke Covid 19. Bantuan-bantuan dari pemerintah desa di salurkan untuk terdampak covid19.

**Tabel 5.3**  
**Kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan Masyarakat**  
**Periode Tahun 2020**

Tahun	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan
2020	Pembangunan Pemecah Gelombang	-	-
	Semenisasi Jalan	-	-
	Peningkatan Jalan	-	-
	Pembangunan Pintu Klib Parit	-	-
	Pembangunan Kanal Bloking Parit	-	-
	Pembangunan Turap Parit	-	-
	Rehabilitasi Musholla	- Al – Hakim	- Perbaikan Toilet - Perbaikan Ruang Gudang
	Rehabilitasi Masjid	-	-
	Penambahan Listrik	-	-
	Penerangan Lampu Jalan	-	-
	Pembangunan Rumah Layak Huni	-	-
	Rehabilitasi Sekolah	-	-
	Pembangunan Posyandu/Pos	- Posyandu Desa	- Perlebaran Ruang Tunggu - Perlebaran Ruang Perawatan

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021

### 5.1.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

#### 1. Bentuk Partisipasi Vertikal

Berdasarkan hasil tabel 5.4. penelitian bahwa Bentuk Partisipasi masyarakat vertikal terlihat dalam kategori ukuran **Tidak Pernah Ikut** mendominasi dengan 26,05 persen. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, bisa diartikan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Menurut Efendi (2002), partisipasi vertikal adalah partisipasi yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program dalam pihak lain. Dalam hubungan tersebut masyarakat berada sebagai posisi bawahan, pengikut atau klien. Pemerintah sudah mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam musrenbang Desa. Namun, di Desa Bantan Air belum terlihat bahwa masyarakat aktif ikut terlibat dalam Musrenbang Desa. Berikut tabel bentuk masyarakat vertikal.

**Tabel 5.4.**  
**Presentase Rata-Rata Partisipasi Masyarakat Bentuk Vertikal**

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Ukuran (%)					Jumlah (%)
		5	4	3	2	1	
1.	Terlibat dalam musrenbang	26,92	9,61	17,30	13,48	32,69	100
2.	Ikut menjadi penentu keputusan	19,23	19,23	15,38	11,55	34,61	100
3.	Menyetujui Keputusan Musrenbang	21,15	13,46	9,61	23,07	32,61	100
Jumlah Persentase		22,43	14,1	14,09	16,03	26,05	100
Jumlah Rata-Rata		35	22	22	25	52	156

Sumber: Olahan Data 2021

## 2. Bentuk Partisipasi Horizontal

Berdasarkan tabel 5.5. hasil penelitian dapat diketahui Bentuk Partisipasi Masyarakat Horizontal yaitu **Tidak Pernah Ikut** dengan 29,80 persen. Sedikit jarak antara Selalu Ikut dengan Tidak Pernah Ikut. Artinya Bentuk partisipasi masyarakat horizontal tidak stabil dalam mengikuti musrenbang. Dalam teori Efendi (2002), partisipasi horizontal adalah partisipasi yang terjadi pada suatu saat tidak mustahil mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Seharusnya masyarakat di Desa Bantan Air mengikuti Musrenbang dengan baik dan selesai agar perencanaan pembangunan sesuai tepat dengan sasaran dan berdasarkan hasil musyawarah bersama. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari Bentuk partisipasi horizontal tidak terlihat adanya masyarakat mengikuti musrenbang dengan sebenarnya ini terlihat dalam Tidak Pernah Ikut masih terlihat tinggi.

**Tabel 5.5.**  
**Presentase Rata-Rata Partisipasi Masyarakat Bentuk Horizontal**

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Ukuran					Jumlah (%)
		5	4	3	2	1	
1.	Menyetujui Rancangan Pembangunan	26,92	3,84	15,38	19,23	43,61	100
2.	Ikut Musyawarahkan Bersama-sama	28,84	15,38	19,23	11,53	25	100
Jumlah Persentase		27,88	9,61	17,30	15,38	29,80	100
Jumlah Rata-Rata		31	10	18	16	29	104

Sumber: Olahan Data 2021

## **5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Diketahui bahwa usaha untuk melakukan suatu pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata akan tetapi keikutsertaan dari berbagai elemen/masyarakat sangat pula dibutuhkan yang hasilnya nanti diharapkan memberi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Keberhasilan suatu pembangunan yang ada di pedesaan merupakan cerminan dari suatu keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena itu yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan nasional dilihat dari keberhasilan pembangunan tingkat desa.

Jadi peran dan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air tentunya memiliki banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk menghemat analisis penulis memilih beberapa faktor diantaranya faktor eksternal yang meliputi bagaimana kepemimpinan pemerintah desa dan tingkat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan faktor internal meliputi tingkat kesadaran diri, pendidikan, pendapatan serta pekerjaan dari masyarakat itu sendiri.

### **5.2.1. Faktor Internal**

Menurut Dorodjatin dalam Sriwahyuni (2017) faktor internal berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri, yakni individu dan satuan kelompok didalamnya. Dalam hal ini tingkah laku individu berhubungan erat dengan ciri-ciri sosiologis seperti pendidikan dan pendapatan. Sedangkan secara teoritis, faktor internal terdapat hubungan antara individu dengan tingkat partisipasi seperti lamanya menjadi anggota masyarakat, jenis pekerjaan serta keterlibatan aktif

masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan itu sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi. (Sriwahyuni. 2017:22).

Berikut ini beberapa pertanyaan yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air sebagai berikut :

### 3. Faktor Kesadaran dan Kemauan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Tabel 5.6, dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat dalam musrenbang yaitu dipengaruhi oleh faktor mengikuti Ajuran Pemerintah dengan responden terbanyak yakni sejumlah 67 persen.

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat top-down, partisipasi masyarakat dalam kebijakan kebijakan yang di buat dan di implementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang bottom-up, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

**Tabel 5.6.**  
**Persentase Faktor Kesadaran dan Kemauan Masyarakat**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Responden (Orang)</b>	<b>Persen (%)</b>
Kemauan Pribadi	5	10
Ikut-Ikutan	9	18
Anjuran Pemerintah	35	67
Arahan Dari Pihak Lain	3	5
Jumlah	52	100

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021

#### 4. Faktor Pendidikan

Berdasarkan tabel 5.7. Persentase Faktor Pendidikan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang sangat mendominasi responden dengan pendidikan terakhir SMA berada 48,07 persen. Ini artinya responden SMA mempengaruhi dalam Musrenbang Desa Bantan Air. Memang rata-rata dari pendidikan masyarakat di Desa Bantan Air banyak yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat lebih senang berada di ladang atau berkebun.

**Tabel 5.7.**  
**Persentase Faktor Pendidikan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Ukuran				Jumlah (%)
		S1	SMA	SMP	SD	
1.	Pendidikan Terakhir Responden	19,23	48,07	17,30	15,38	100
	Rata-Rata	10	25	9	8	52

Sumber: Olahan Data 2021

#### 5. Faktor Pendapatan

Berdasarkan tabel 5.8. Persentase Faktor Pendapatan dikatakan bahwa dalam melihat pendapatan masyarakat Desa Bantan Air yang mengikuti Musrenbang Desa yang tertinggi ialah pendapatan Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 atau 48,07 persen. Dapat dikatakan pendapatan sangat mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti musrenbang desa. Karena pendapatan yang rendah membuat masyarakat lebih memilih untuk mencari nafkah dan tidak bisa memprioritaskan mengikuti musrenbang desa setiap tahunnya. Angka Ini juga menjadi informasi penting bahwa masyarakat Desa Bantan Air memiliki pendapatan dibawah rata-rata artinya berada dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 5.8.**  
**Persentase Faktor Pendapatan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Ukuran				Jumlah (%)
		4	3	2	1	
1.	Pendapatan Responden	48,07	23,07	15,38	7,69	100
	Jumlah Rata-Rata	25	15	8	4	52

Sumber: Olahan Data 2021

### 5.2.2. Faktor Eksternal

Berdasarkan tabel 5.9 kategori Faktor Eksternal bahwa yang memilih Kategori Disampaikan Informasi Undangan yang mengatakan Iya ada 65,38 persen untuk mengatakan Tidak ada 34,61 persen. Artinya Pemerintah Desa menjalankan undangan ke setiap masyarakat agar diharapkan masyarakat untuk mengikuti musrenbang.

Kemudian untuk kategori fasilitas pendukung desa mengatakan Iya ada 21,15 persen kemudian Tidak 78,84 persen. Ini dialasankan bahwa masyarakat mengikuti musrenbang karena fasilitas pendukung untuk acara musrenbang sangat tidak mendukung. Berikut adalah hasil dari penelitian pembagian kuesioner :

**Tabel 5.9.**  
**Persentase Jumlah Kategori Faktor Pemerintah dan Fasilitas Desa**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Ukuran		Jumlah	
		Ya	Tidak		
1.	Mendapatkan Informasi Undangan	34	18	65,38	34,61
2.	Fasilitas Pendukung di Kantor Desa	11	41	21,15	78,84
	Jumlah	45	59	100%	

Sumber: Olahan Data 2021

### 5.3. Terukurnya Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi menurut Wilcox dalam Aprillia (2014: 202) Mengemukakan bahwa terdapat lima tingkatan partisipasi, Diantaranya yaitu: Memberikan Informasi, Konsultasi, Pengambilan Keputusan Bersama, Bertindak Bersama, Memberikan Dukungan.

Berdasarkan hasil penelitian tabel 5.10. Persentase Tingkat Partisipasi bahwa indikator **Informasi** responden memilih Tidak Pernah Ikut (1) paling tertinggi dengan angka 32,70 persen.

Dalam indikator **Konsultasi** paling tertinggi responden memilih Tidak ada Sama Sekali (1) dengan jumlah angka 49,00 persen. Salah satu alasan responden mengatakan bahwa masyarakat sudah mengikuti beberapa kali musrenbang desa namun ide dan gagasannya tidak pernah dilanjutkan. Ini membuat masyarakat mengikuti Musrenbang tidak mempercayai hasil dari musrenbang desa.

Kemudian dalam indikator **Keputusan Bersama** bahwa masyarakat tidak banyak dalam mengambil keputusan bersama di musrenbang desa dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang desa. Hasil penelitian responden banyak mengambil Tidak Pernah Ikut Sama Sekali dengan jumlah 46,00 persen.

Selanjutnya dalam indikator **Kerja Sama** responden memilih tertinggi Tidak Pernah Ikut dengan angka 37,00 persen. Masyarakat dalam mengatakan hasil kesepakatan Musrenbang Desa Bantan Air selalu mengikuti. Dan Responden mengatakan iya dalam berkontribusi pengambilan keputusan musrenbang Desa.

Terkahir dalam **Memberikan Dukungan** responden banyak memilih Tidak Pernah Ikut dengan angka tertinggi 38,46 persen. Alasan Responden dalam

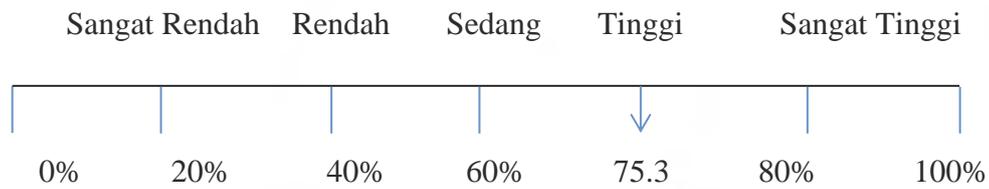
memilih Tidak Pernah Ikut karena pemerintah desa tidak memberikan hak nya dalam menyampaikan gagasan dan ide dalam musrenbang desa. Namun, Masyarakat kebanyakan tidak menyampaikan ide dan gagasan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi dan keterbatasan dalam beragurmen.

Dari hasil penelitian kuesioner dengan Terukurnya Tingkat Partisipasi Masyarakat diatas bahwa Tidak Sama Sekali paling tertinggi dengan 39,432 persen. Dan persentase paling rendah ialah Kadang-Kadang dengan angka 17,04 persen. Masyarakat ingin mengikuti musrenbang tetapi terhambat karena pekerjaan dan ada yang beralasan bahwa Musrenbang hanya acara seremonial saja. Beberapa usulan-usulan masyarakat banyak yang tidak berhasil direalisasikan padahal setiap tahunnya masyarakat mengusulkan usulan yang sama namun tidak ada kejelasan dari pemerintah untuk menindak lanjuti dari usulan tersebut. Ini membuat masyarakat enggan mengikuti proses musrenbang tersebut. Berikut adalah tabel 5.10. Persentase Tingkat Partisipasi :

**Tabel 5.10.**  
**Persentase Tingkat Partisipasi**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Ukuran				
		5	4	3	2	1
1	Informasi	14,42	11,54	15,38	25,96	32,70
2	Konsultasi	16,02	16,02	18,96	-	49,00
3	Keputusan Bersama	18,38	14,40	22,02	-	46,00
4	Kerja Sama	30,76	22,63	9,61	-	37,00
5	Memberikan Dukungan	19,23	23,08	19,23	-	38,46
<b>Jumlah Rata-Rata</b>		23,162	17,534	17,04	25,96	39,432

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021



Keterangan :

81- 100% (ST) = Partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori sangat tinggi.

61- 80% (T) = Partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori tinggi.

41- 60% (S) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori sedang

21- 40% (R) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori rendah

0-20% (SR) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori sangat rendah.

Berdasarkan Skala Likert diatas diatas bahwa masyarakat di Desa Bantan dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa berada di angka 21-40% (R) atau Partisipasi masyarakat tergolong kategori rendah. Ini didasarkan hasil keseluruhan peneliti membagikan kuesioner kepada masyarakat yang terlibat dalam proses musrenbang desa. Banyak usulan-usulan masyarakat yang tidak dilanjutkan menjadi alasan kuat masyarakat partisipasi masyarakat desa bantan air rendah.

Menurut wilcox dalam Tri Wahyuni (2016), pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk mengambil kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Tingkat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air Kecamatan Bantan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air adalah berbentuk Partisipasi Vertikal sekitar 26,05 persen. Masyarakat tidak terlibat dalam menentukan keputusan di forum musrenbang dan masyarakat tidak menyetujui keputusan musrenbang.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Bantan Air dari hasil penelitian didapatkan bahwasannya yang mempengaruhi lebih kepada faktor Internal, dimana sekitar 67 persen masyarakat menyatakan berpartisipasi berdasarkan anjuran pemerintah, disamping itu rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat adalah tamatan SMA dinyatakan sekitar 48 persen, sementara rata-rata pendapatan masyarakat 48,7 persen mempunyai pendapatan Rp 500.000 – Rp 1.000.000.
- c. Berdasarkan hasil analisis bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembanguanna Desa Bantan air berada angka 31,43

persen dengan rank 21-40 persen (R) atau Partisipasi masyarakat tergolong kategori rendah.

## 6.2. Saran

Adapun mengenai saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pemerintah Desa Bantan Air agar mengajak masyarakat dalam terlibat dan keaktifan dari setiap masyarakat untuk aktif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan dalam pembahasan perencanaan pembangunan Desa dari tingkat Desa maupun tingkat Kabupaten. Pemerintah Desa Bantan Air juga harus melakukan sosialisasi dalam Musrenbang Desa. Agar musrenbang selanjutnya masyarakat bisa memahami jalannya musrenbang Desa. Dan ikut aktif dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam di musrenbang Desa.
- b. Dalam faktor-faktor tingkat partisipasi masyarakat vertikal peneliti memberikan saran yaitu :

- 1) Faktor Kesadaran/Kemauan

Agar kesadaran/kemauan masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa selalu terjaga, Pemerintah melakukan sosialisasi musrenbang desa dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mengikuti musrenbang desa.

## 2) Faktor Pendidikan

Kurangnya tingkat pendidikan di Desa Bantan Air peneliti memberikan saran agar Pemerintah Desa memberikan perhatian yang lebih kepada kualitas pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat desa bantan air supaya mau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk menjadi sarjana agar SDM desa bantan air mampu bersaing dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang positif.

## 3) Faktor Pendapatan/Penghasilan

Dengan masih rendahnya pendapatan/penghasilan dari masyarakat Desa Bantan Air, Pemerintah Desa bisa memperhatikan masyarakat dengan membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik agar tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat diatas rata-rata garis kemiskinan.

c. Dengan hasil dari penelitian bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah peneliti memberikan saran agar tahun selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Bantan Air bisa meningkat dengan cara :

1) Memberikan hak sepenuhnya untuk masyarakat berbicara dalam forum musrenbang Desa Bantan Air. Dengan memberikan hak berbicara ini masyarakat bisa menyampaikan ide dan gagasan untuk perencanaan pembangunan Desa Bantan Air kedepannya.

- 2) Melibatkan semua unsur masyarakat dalam semua kegiatan pembangunan Desa Bantan Air. Dengan melibatkan semua unsur masyarakat di Desa Bantan Air pembangunan akan transparan.
- 3) Memprioritaskan pembangunan berdasarkan dari usulan-usulan masyarakat. Agar perencanaan yang telah disepakati bersama tepat sasaran dan sesuai kebutuhan Desa Bantan Air.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, R., *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2006.
- Arsito. 2004. *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis*.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. 2015. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*. Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Cahyo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Cetakan Pertama. 2015.
- Hariyono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu Sp. 2012. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.
- Johara T. Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Nugroho, I dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Nazir M. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia , Bogor, 2005.
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Malang: FIA Unibraw.
- Mikkelesen Britha. *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.

Maulana.2013.Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Jombang

Pontoh, Nia K. dan Iwan Kustiwan. 2008. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.

Rochajar dan Ardiantoro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011.

Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1. Bandung : Al-Fabeta. 2005.

Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Baduose Media.

Sriwahyuni, Ningsih. 2017. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Wibowo, H. 2010. *Reformasi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat*. Bandung: UNPAD PRES

### **Jurnal**

Andreeyan. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara, 2014, 2 (4): 1938-1951.

- Elida. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan*. Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008.
- Herman. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, 75-98, 2019.
- Lisa, Hanny, Lahamendu. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Sario Kota Manado*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Putri, Mukhtiali. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang*. Jurnal Pengembangan Kota (2018) Volume 6 No. 2 (108–117).
- Tri. *Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemita Di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur*. Volume 12 (4) : 472 - 482 Desember 2016
- Uceng, Ali, Dkk. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019, hlm 1-17.
- Wahyu, Mussadun. *Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 11 (4): 377-390 Desember 2015.

## **Tesis**

Suciati. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Suciati. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Tesis. Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang

## **Skripsi**

Maulana, Indra. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi Usulannya di Kota Surakarta*.

Melis. 2016. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Wawoleses Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara*.

Tapparang, Amelia. 2010. *Model Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Yendri, Yulfi. 2015. *Efektifitas Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Pedesaan Melalui Organisasi Masyarakat Setempat Studi Kasus Desa Pangkalan Batang Barat, Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Wibowo, Agus Harto. 2009. *Analisis Perencanaan Partisipatif Studi Kasus di Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

#### **Website**

<https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-partisipasi-masyarakat-desa/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan?page=all>

<https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PARTISIPASI-MASYARAKAT-DALAM-PEMBANGUNAN-Welasari-Ardieansyah/cf29dd44479f9a92bdabff256bc3b855f2b73f6d>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bengkalis#:~:text=Kabupaten%20Bengkalis%20adalah%20salah%20satu,luas%20adalah%206.973%2C00%20km%C2%](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkalis#:~:text=Kabupaten%20Bengkalis%20adalah%20salah%20satu,luas%20adalah%206.973%2C00%20km%C2%)

B2